

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan hukum investasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak Provinsi Papua pada kenyataannya tidak mewujudkan tujuan pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu karena tidak sinkronnya Kebijakan hukum investasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua khususnya dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Pusat dalam pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak Provinsi Papua tidak menyesuaikan dengan sistem Pemerintahan Otonomi Khusus yang di berlakukan di Provinsi Papua.

B. Saran

Pemerintah Perlu menetapkan norma hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan investasi pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak, dalam merumuskan norma hukum tersebut Pemerintah perlu memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintah Daerah Provinsi Papua segera menyusun Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS) dalam bidang Penanaman Modal/Investasi berdasarkan amanat Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua agar dapat memberikan kesejahteraan bagi orang asli Papua dan dapat menunjang iklim investasi yang kondusif yang dapat menarik investor dalam berinvestasi pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak Provinsi Papua.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamaruddin., 1996 *Dasar-dasar Manajemen Investasi Rineka Cipta Jakarta*
- Asshiddiqie Jimly., 2006 *Perihal Undang-Undang Konstitusi Pers Jakarta*
- Bagus Ida Wyasa Putra, dkk., *Hukum Bisnis Pariwisata Reflika Aditama Bandung* 2003
- B. Sugono., 1998 *Metodologi Penelitian Hukum suatu Pengantar*, Cet. Kedua, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Hufron. H. Dan Husein Wahyudin HM., 2008 *Hukum Politik dan Kepentingan Laks Bang Pressindo Yogyakarta*
- Istanto Sugeng., 2006 *Hand Oud Politik Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*
- Kansil S.T. Christine dan Kansil C.S.T., 2001 *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)* PT Pradnya Paramita Jakarta
- Mahufud Moh., 1999 *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* Gama Media
-, 1998 *Politik Hukum di Indonesia* Pustaka LP3ES Jakarta
- Mamuji, Sri dan Soekanto S., 1985 *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Cet.1 CV. Rajawali Jakarta*
- Mertokusumo Sudikno., 1996 *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi I Cet.I, Liberty Yogyakarta
- Miftahudin Muh. Luthan Salman dan Muqoddas Busyro., 1992 *Politik Pembangunan Hukum Nasional* UII Pres Yogyakarta
- Pound Roscoe., 1982 *Pengantar Filsafat Hukum* diterjemahkan oleh Mohamad Radjab Bharata Karya Aksara Jakarta
- Raharjo . R., 2000 *Ilmu Hukum*, Cet ke-V, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Setia Hadi Tuggal., 2007 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 Tentang Pemekaan Provinsi Papua* Harivando Jakarta
- Suhardi Gunarto., 2006 *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah* Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Sumantoro., 1986 *Hukum Ekonomi* Universitas Indonesia Jakarta
- Sunaryati Hartono., 1982 *hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* Bina cipta Bandung
- Sutrisno Budi dan HS., 2008 *Salim Hukum Investasi Di Indonesia* PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Usman Rachmadi ., 2000 *Hukum Ekonomi dalam Dinamika* Djembatan Jakarta
- Vishny W Robert Shleifer Silanes, dan de- Lopez- Andrei *Law and Finance.*, 1998 dalam *The Journal of Political-Economy* Vol 106, No 6, Th
- Winarno Budi ., 2007 *Kebijakan Publik Teori dan Proses* MedPress Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 1143).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Jaya barat dan kabupaten-kabupaten otonomi di Propinsi Irian barat (Lembaran negara tahun 1969 Nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 3501).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 115 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501
- Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara 3848)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4151
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Ekonomi Terpadu Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3949
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau Daerah- daerah tertentu Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan barang kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua

